



K L I P I N G

MASS MEDIA FAJAR TRIBUN CAKRAWALA CAKRAWALA SINDO CELEBES NEWS INILAH SULSEL KOMPAS BERITA KOTA UJUNG PANDANG EKSPRES KORAN TEMPO**TANGGAL :**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																						✓								

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
									✓		

TAHUN**2015****HAL****2**

ANGGARAN DAERAH

BELANJA PEMDA 50%

MESKI sempat lelet di awal tahun, pemerintah mengklaim kinerja penyerapan anggaran di daerah kini sudah mulai membaik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rata-rata penyerapan anggaran di daerah sampai dengan Oktober 2015 sudah di atas 50%. Untuk penyerapan anggaran daerah di level provinsi misalnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan data yang masuk ke kementeriannya sampai dengan Oktober ini rata-rata penyerapan anggarannya sudah mencapai 54%.

Sementara, untuk level kabupaten, penyerapan anggaran daerah mencapai 50%. "Daerah sudah berkomitmen, dan merasa yakin, nanti penyerapan anggaran akan semakin baik," katanya, kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Pandjaitan menambahkan, agar penyerapan anggaran di daerah cepat, pemerintah lewat Kantor Menko Polhukam, kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melakukan sosialisasi penggunaan anggaran di daerah. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengurangi ketakutan pejabat daerah dalam melaksanakan anggaran.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah juga akan meminta aparat penegak hukum agar tidak buru-buru memperkarakan pejabat daerah. Caranya, pemerintah melarang aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah sebelum batas waktu 60 hari untuk mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyimpangan penggunaan anggaran terlewati.

"Polisi, jaksa, tidak boleh genit langsung panggil, kalau ada yang memanggil, laporan, kami akan gasak mereka, kami serius tangan ini kalau ada yang mau main-main," katanya.

Catatan saja, masalah klasik penyerapan anggaran di daerah hingga kini terus terjadi. Rendahnya penyerapan anggaran di daerah ini bisa terlihat dari besarnya dana menganggur di daerah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai Oktober ini jumlah dana yang mengendap di daerah Rp232,3 triliun. (int)